



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : BUMN/BUMD  
**LEMBAGA** : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)  
**UNIT KERJA** : PLN KANTOR PUSAT

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **ANDRI YUNALDI**
2. Jabatan : **EXECUTIVE VICE PRESIDENT AUDIT NIAGA, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN ENABLER**
3. NHK : **197122**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 6.350.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 265 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 4.600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 261 m2/200 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/150 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 999.000.000**

1. MOTOR, HONDA SCOOPY BEBEK Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOBIL, TOYOTA CAMRY SEDAN Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO BEBEK Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
4. MOBIL, TOYOTA RAIZE MPV Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
5. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SUV Tahun 2021, LAINNYA Rp. 550.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. 180.000.000**

**D. SURAT BERHARGA** **Rp. ----**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.118.949.296
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	8.647.949.296
III. HUTANG	Rp.	389.406.825
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	8.258.542.471

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.